



Judul	: Konsolidasikan Riset Maksimalkan BRIN
Tanggal	: Jumat, 16 April 2021
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 13

# Konsolidasikan Riset Maksimalkan BRIN

*Perpres reorganisasi BRIN itu sampai sekarang tertahan di tangan Kementerian Hukum dan HAM, meski Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk mengundangkannya.*

ILHAM PRATAMA PUTRA  
redaksi@mediaindonesia.com

**P**ERAN Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dinilai bisa maksimal memimpin sejumlah proyek riset strategis nasional, setelah peleburan Menristek ke Kemendikbud.

Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho seperti dilansir dari Medcom.id,

kemarin.

“Saya rasa BRIN ini akan digunakan sebagai pilot project untuk center of excellence riset di Indonesia,” kata Jamal.

Selama ini, ketika masih bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi, kata dia, keberadaan BRIN seolah tertutup. Selain itu, fungsi

BRIN yang sesungguhnya juga tak tampak. “Secara struktur organisasi penempatan orang-orang di eselon satu sebagai orang yang bisa menjawab

seluruh kebijakan Pak Menteri, masa satu setengah tahun belum selesai?” tanyanya.

. Seperti diketahui, pembentukan BRIN ialah amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek. Pasal 48 ayat (1) menyatakan, untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk BRIN.

Penunjukan Menristek Bambang Brodjonegoro merangkap sebagai Kepala BRIN dinyatakan dalam Perpres 74/2019 tentang BRIN, tetapi perpres itu hanya berlaku sampai 31 Desember 2019.

Karena itu, Bambang mengajukan perpres reorganisasi BRIN dan sudah disetujui Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2020.

tidak selesai-selesai, apalagi jika ikut mengurus riset. “Karena urusan pendidikan saja sudah seabreg (banyak) dan tantangannya berat di masa pandemi ini,” serunya.

Terkait dengan Mendikbud-Ristek baru, Ubaid menyampaikan, sosok itu harus berpengalaman, bukan orang yang baru mengerti dunia pendidikan.

## Kebingungan

Anggota Komisi VII DPR Muhyanto menilai pembentukan BRIN yang tidak kunjung usai selama 17 bulan, ditambah dengan penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud, membawa konsekuensi hilangnya legalitas Menristek/BRIN sebagai koordinator Konsorsium Riset Covid-19. Karena itu, ia mendesak pemerintah segera bersikap.

“Jangan sampai penggabungan lembaga itu membuat program riset vaksin Merah Putih terlambat. Tidak mengherankan jika Direktur LBM Eijkman yang menjadi motor dalam pengembangan vaksin Merah Putih kebingungan,” cetusnya. (Sru/H-2)